

## Evaluasi Perilaku Kekerasan Narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

Syahrial Yuska <sup>1</sup>, , Muhammad Ali Equatora <sup>2,\*</sup>, ,  
Mitro Subroto <sup>3</sup>, , dan Imaduddin Hamzah <sup>2</sup>, 

<sup>1</sup> Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 16512, Depok, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Bimbingan Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 16512, Depok, Indonesia

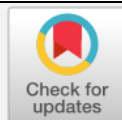
<sup>3</sup> Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, 16512, Depok, Indonesia

\* Korespondensi: [bangtora1973@gmail.com](mailto:bangtora1973@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



#### Sitasi Cantuman:

Yuska, S., Equatora, M. A. Subroto, M., & Hamzah, I. (2022). *Evaluation of Violent Behavior Prisoners by Correctional Officers at Correctional Institutions*. *Society*, 10(1), 13-24.

DOI: [10.33019/society.v10i1.284](https://doi.org/10.33019/society.v10i1.284)

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

### ABSTRAK

Beberapa peristiwa kekerasan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Salah satunya di Sumatera Barat, dimana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Padang mencatat tiga kasus sepanjang tahun berjalan di tahun 2019, terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman. Kejadian serupa terjadi pada tahun 2018 di mana anak-anak di lembaga pemasyarakatan tercatat mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa 26,8 persen anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan korban kekerasan pada tahun 2018. Ada liputan media yang meluas tentang kekerasan petugas dan masalah pemasyarakatan yang kompleks dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan studi literatur dan wawancara tidak terstruktur dengan petugas pemasyarakatan, beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan petugas terhadap narapidana. Faktor-faktor berikut adalah sikap menghukum petugas pemasyarakatan terhadap narapidana dan kurangnya pengetahuan hak asasi manusia, Standar Minimum Rules (SMR), dan teknis pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang mencakup studi kasus tentang suatu peristiwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dimaksudkan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian dimana tidak ada pemisahan fenomena dan konteks dalam tontonan.

**Dikirim:** 11 Januari, 2021;  
**Diterima:** 14 Desember, 2021;  
**Dipublikasi:** 24 Juni, 2022;

*Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu petugas melakukan kekerasan terhadap warga binaan pemasarakatan. Banyak hal yang menyebabkan perilaku kekerasan, seperti stres, masalah psikis, dan sebagainya.*

**Kata Kunci:** Evaluasi; Kekerasan; Narapidana; Pemasarakatan

## 1. Pendahuluan

Dalam tiga tahun terakhir, maraknya pemberitaan media tentang kekerasan yang dilakukan petugas dan permasalahan pemasarakatan yang kompleks. Posisi lembaga pemasarakatan yang rentan terhadap stabilitas keamanan dan upaya pembinaan juga dianggap sebagai jargon kosong pemanis kelembagaan ([Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2018](#)). Beberapa peristiwa kekerasan telah terjadi di Lembaga Pemasarakatan. Salah satunya di Sumatera Barat, di mana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Padang mencatat tiga kasus pada 2019. Satu terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pariaman ([Covesia.com, 2019](#)). Laporan dari klien mengatakan mereka menjadi sasaran hingga memar dan penyiksaan dari petugas karena perkelahian sesama narapidana, dan beberapa pelanggaran yang berakibat pada kesehatan narapidana. Kejadian serupa terjadi pada tahun 2018 di mana anak-anak di lembaga pemasarakatan tercatat mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan bahwa 26,8 persen anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak mengalami kekerasan pada 2018 ([Tirto.id, 2019](#)).

Contoh lain adalah peristiwa yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banceuy Bandung. Peristiwa ini terjadi karena emosi beberapa narapidana yang tidak terima dengan meninggalnya salah satu narapidana bernama Undang Kosim yang ditemukan gantung diri di sel isolasi Gandapurnama ([Detikcom, 2016](#)).

Salah satu bukti belakangan ini mencerminkan penegasan ini: video dugaan tindak kekerasan oleh narapidana narkoba menjadi sorotan dan perbincangan publik akhir-akhir ini. Video yang beredar di berbagai media menunjukkan beberapa narapidana diseret, diangkat, dan mengalami kekerasan lainnya oleh petugas pemasarakatan. Menurut Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Dirjen PAS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), peristiwa yang terjadi saat pemindahan narapidana ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah merupakan peristiwa yang melanggar SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ada. Menurut data Forum Pemerhati Pemasarakatan (FPP) pada 5 Mei 2019, video kekerasan narapidana Nusakambangan ini telah dibagikan oleh lebih dari 35.000 pengguna Facebook dengan 15.000 komentar. Fenomena ini juga menjadi bahan kajian bagi Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan kader-kader pemasarakatan di seluruh Indonesia selama puluhan tahun. Sebagai akuntabilitas akademik dan moral Poltekip perlu mengkaji dan mengambil tindakan lebih lanjut agar pemasarakatan tidak lagi melanggar SMR dan UU No 12 Tahun 1995 untuk mewujudkan lembaga pemasarakatan yang lebih baik ([Republik Indonesia, 1995](#)). Berdasarkan studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan petugas pemasarakatan, beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan petugas terhadap narapidana. Faktor-faktor berikut adalah sikap menghukum petugas pemasarakatan terhadap narapidana dan kurangnya

pengetahuan tentang hak asasi manusia, SMR, dan teknis pemasarakatan petugas pemasarakatan.

Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu petugas melakukan kekerasan terhadap warga binaan pemasarakatan. Banyak hal yang menyebabkan perilaku kekerasan, seperti stres, masalah psikis, dan sebagainya. Lapas sebagai sebuah lembaga, memiliki kompleksitas permasalahan dan menjadi fenomena tersendiri yang dapat menunjukkan situasi yang berbeda dalam hal pekerjaan dan tanggung jawab. Perilaku kekerasan yang terjadi memang memiliki faktor pendukung dan penghambat untuk dilakukan atau tidak dilaksanakan. Narapidana seharusnya mendapatkan pelayanan yang diamanatkan secara hukum dan tidak melanggar hak-hak narapidana. Hal inilah yang menjadi tujuan penelitian untuk lebih mendalami faktor dan penyebab terjadinya perilaku menyimpang.

## 2. Studi Pustaka

Niat merupakan faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku. Menurut Fishbein & Ajzen, sebagaimana dikutip dalam Ajzen (1985), niat adalah posisi seseorang dalam dimensi probabilitas subjektif yang melibatkan hubungan antara dirinya sendiri dan beberapa tindakan. Niat dapat menunjukkan seberapa banyak seseorang akan berusaha untuk melakukan perilaku tertentu. Niat masih merupakan disposisi untuk berperilaku sampai saat ada kesempatan yang tepat. Niat terdiri dari empat unsur, yaitu:

- a. Perilaku tertentu
- b. Perilaku mengarahkan objek target
- c. Situasi tersebut dilakukan oleh
- d. Ketika perilaku itu dilakukan

Warshaw & Davis, sebagaimana dikutip dalam Landry (2003), menjelaskan bahwa niat adalah sejauh mana seseorang merumuskan rencana untuk menunjukkan tujuan masa depan tertentu atau tidak, dan itu semua dilakukan secara sadar. Mereka berdua juga menambahkan bahwa niat melibatkan pembentukan komitmen perilaku untuk menunjukkan suatu tindakan atau tidak. Ada harapan bahwa seseorang mengharapkan untuk menunjukkan suatu tindakan bahkan ketika komitmen belum dibuat.

Fishbein & Ajzen, sebagaimana dikutip dalam Ajzen (1985), mengemukakan bahwa berdasarkan reasoned action theory, niat mencerminkan keinginan individu untuk mencoba membentuk perilaku, yang terdiri dari tiga determinan, yaitu:

- a. Sikap Terhadap Perilaku  
Sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan mengarah pada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Individu dengan keyakinan positif dalam perilaku cenderung melakukan tindakan tersebut. Atau dengan kata lain, sikap yang mengarah pada perilaku ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, yang disebut dengan istilah keyakinan dalam perilaku (*belief in behavior*).
- b. Norma Subjektif  
Keyakinan tentang perilaku apa yang normatif (yang diharapkan orang lain) dan motivasi untuk bertindak mengikuti harapan normatif membentuk norma subjektif dalam diri individu. Keyakinan yang mendasari norma subjektif bahwa individu telah disebut sebagai keyakinan normatif. Individu percaya bahwa individu atau kelompok tertentu akan menerima atau tidak menerima tindakannya. Jika individu percaya pada norma kelompok,

mereka akan mematuhi dan membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompoknya. Dapat disimpulkan bahwa norma kelompok ini membentuk norma subjektif dalam diri individu, yang pada akhirnya akan membentuk perilakunya.

c. Kontrol Perilaku Sadar

Kontrol perilaku adalah keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor yang memfasilitasi dan menghambat kinerja perilaku individu. Keyakinan ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya dari perilaku tersebut, yang dipengaruhi oleh informasi dari orang lain, misalnya, dari pengalaman orang atau teman yang dikenal. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang meningkatkan atau mengurangi kesulitan yang dirasakan dalam melakukan tindakan atau perilaku tersebut. Kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman dan perkiraan individu tentang seberapa sulit atau mudahnya untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. Kontrol perilaku ini sangat penting ketika kepercayaan diri seseorang sedang dalam keadaan lemah.

Perilaku kekerasan atau agresif adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti seseorang secara fisik dan psikis (Dermawan & Rusdi, 2013). Perilaku ini menurut Fitria (2010) ditandai dengan:

- 1) Fisik: Mata tampak tajam, tangan terkepal, rahang tertutup, postur tegang dan kaku
- 2) Verbal: Mengancam, mengumpat dengan kata-kata kotor berbicara dengan nada keras, kasar, dan atau ketus
- 3) Perilaku: Menyerang orang lain dan menyakiti orang lain
- 4) Intelektual: Mendominasi, kasar, berdebat, meremehkan, dan tidak jarang mengeluarkan kata-kata bernada sarkasme.

Ketika kekerasan dan perilaku agresif dalam suatu lembaga terjadi, biasanya akan menarik perhatian media. Dalam hal ini, aturan dan harapan perilaku bertentangan dengan apa yang terjadi. Ketika situasi ini terjadi, akan muncul banyak pertanyaan tentang bagaimana kemampuan sebuah lembaga untuk menjaga aturan berjalan dengan baik. Salah satu hal penting dalam mengubah identitas seseorang dari mengenakan seragam misalnya menjadi petugas pemsarakatan adalah dapat menjelaskan bagaimana seseorang dapat menunjukkan perilaku agresifnya. Bahkan dalam beberapa hal, para petugas tidak menunjukkan identitas mereka di satu sisi untuk melindungi diri mereka sendiri dan membuat mereka cukup bebas untuk bertindak.

Lebih lanjut, Bernard (1990) berpendapat bahwa tindakan kelembagaan yang agresif merupakan salah satu faktor tingkat stres yang dialami oleh petugas, misalnya di unit pelaksana teknis pemsarakatan. Ketidakmampuan mengatasi hal tersebut menjadi penyebab meningkatnya tingkat agresivitas petugas di lapangan yang dihadapkan pada kondisi yang mungkin dapat memicu emosinya. Tingkat stres juga bisa disebabkan oleh hubungan dengan rekan kerja yang merasa tidak diperlakukan dengan baik dan kemudian menular ke rekan kerja yang lain. Sehingga hubungan negatif yang terjadi antara satu sama lain meningkatkan frustrasi dan kemarahan yang berdampak pada lingkup pekerjaan.

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang membantu peneliti menggali lebih dalam dari informasi faktual yang akan dianalisis. Studi kasus dimaksudkan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian dimana tidak ada

pemisahan fenomena dan konteks dalam fenomena yang terjadi (Prihatsanti *et al.*, 2018). Penelitian ini berfokus pada satu objek kunci yang mempelajarinya sebagai kasus dalam studi kasus data yang diperoleh dari semua pihak yang terlibat dalam topik penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini mengumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003). Peneliti sendiri sedang mempersiapkan instrumen penelitian kualitatif. Peneliti harus mampu merekam data berupa perilaku atau penampilan sumber data karena arus dicatat secara tertulis tanpa menyertakan interpretasinya.

Peneliti merupakan instrumen utama karena hanya peneliti yang dapat berperan sebagai alat yang ada dan merespon realitas. Instrumen penelitian kualitatif disusun dengan perangkat lain, yaitu pedoman wawancara terstruktur dan observasi. Lagi pula, itu tidak mudah (Equatora, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan model triangulasi dalam pengujian validitas, artinya data diinterpretasikan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berkali-kali. Ada triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi diperlukan untuk meninjau validasi data dengan memeriksa informasi yang diterima dari informan.

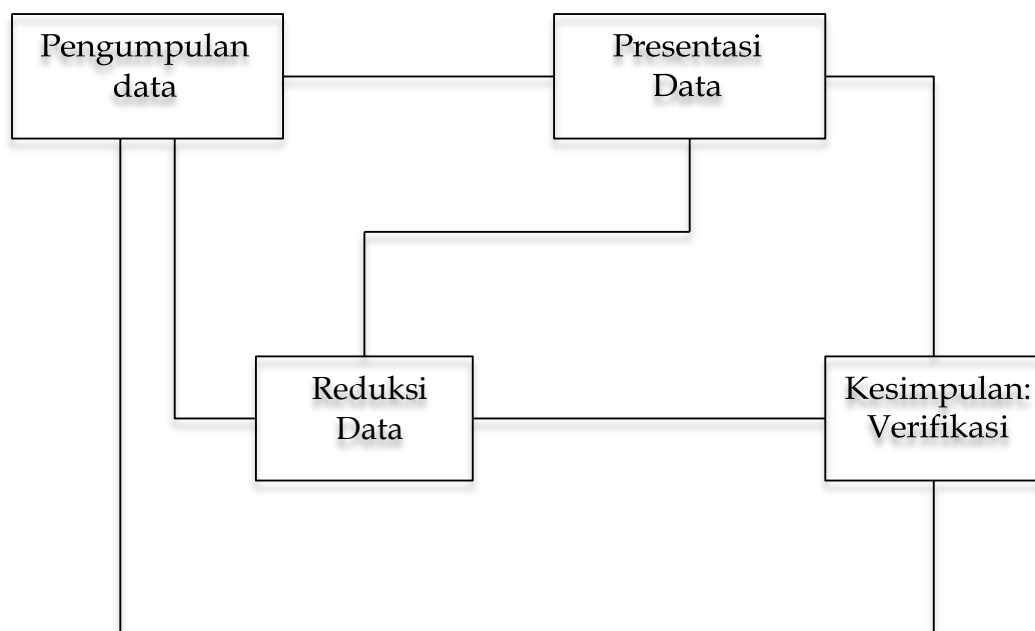
2) Teknik Triangulasi

Teknik ini memeriksa sumber data yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda. Misalnya, data wawancara akan diperiksa dengan observasi dan dokumentasi.

3) Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam melakukan wawancara, informan diwawancarai pada pagi hari untuk memberikan jawaban yang lebih valid karena kondisi informan masih segar.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis data, penyelidikan penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan tersebut berlangsung secara bersamaan. Analisis data ini dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Analisis Data

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Sikap Petugas tentang Kekerasan terhadap Narapidana

Menurut wawancara dengan tiga petugas Lapas, banyak narapidana yang dipindahkan/mutasi ke Nusakambangan adalah narapidana bermasalah di penjara bawah tanah sebelumnya. Salah satu sumber mengatakan, petugas pemasyarakatan yang mengawal para napi yang dipindahkan memberikan informasi bahwa napi tersebut pernah berpindah-pindah dan sering membuat onar di lapas sebelumnya.

Petugas menilai “*shock therapy*” merupakan solusi agar narapidana mematuhi aturan, takut, dan menjaga perilakunya selama menjalani hukuman pidana. Digambarkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*“ya itukan sengaja kadang kadang pak itu ada apa di berkasnya ituloh pak oh ini melawan petugas, oh ini disana bikin onar, terus dan lain sebagainya lah pak ya istilahnya untuk apa ya untuk melemahkan lah kasarannya istilahnya jangan sampai oh kita disini berkasnya disini itu disana bikin onar disana melawan petugas dan sebagainya ya sampai sini kok istilahnya gak untuk pengenalan” (Wawancara dengan K.L.L.N).*

#### 4.1.2. Petugas Ingin Mengembalikan Muruah Nusakambangan

Dikenal sebagai pulau penjara sejak pemerintah kolonial Hindia Belanda, Nusakambangan ditakuti oleh penjahat dan narapidana. Kesan ini dianggap petugas sudah pudar. Mereka seolah menghimbau untuk mengembalikan muruah Nusakambangan agar ditakuti oleh para napi dan memberi mereka efek jera. Digambarkan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*“kalo sebenarnya di lingkup Nusakambangan itu kan tahap revitalisasi ya pak, kan Nusakambangan dijadikan muruah, jadi muruah Nusakambangan itu harus ada ya dikembalikan lagi muruahnya contohnya kalo ada tahanan baru masuk sini, bagaimana rasanya mereka harus jera harus kapok. Ya dampaknya mereka yang mau kesini lagi udah kapok ternyata Nusakambangan seperti ini ya. Memang sebenarnya memang harus ada muruahnya harus seperti itu” (Wawancara dengan P.L.L.N).*

*“kita tidak mau nama ini rusak karena mereka datang tercoreng lagi gitu, karena di Nusakambangan sendiri sudah banyak korban, apalagi terkait dengan peredaran narkoba banyak petugas juga yang kena” (Wawancara dengan A.L.L.B).*

#### 4.1.3. Petugas Geram ketika Riwayat Kasus Narapidana Bertentangan dengan Nilai-Nilai Subjektif

Petugas akan lebih geram jika riwayat kasus narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan bertentangan dengan nilai subjektif petugas. Misalnya, dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur, ketika petugas merasa anggota keluarganya diperlakukan sebagai korban (keluarga adalah nilai penting yang dipegang petugas), mereka akan geram ketika menemukan narapidana yang melakukan pemerkosaan terhadap anak. Tergambar dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*"Ada mas, aku rasa sih gitu kalau isu-isu anak dia kesel. Perlindungan anak nih. Misalnya ada pensiunan nih kakek-kakek melecehkan anak umur 7 tahun. Ini bagian Ibu nih kalau perlindungan anak nih. Saya dipanggil, Saya pelajari dulu kasusnya. Saya langsung panggil dia kakek. Itu kan seusia cucu mbah apa mbah ga pikir? Dia bilang khilaf khilaf, yaa ada rasa kesel kepingin pukul tapi ya itu saya ingin ikuti jejak bapak saya jangan sampai mengotori tangan"* (Wawancara dengan W.L.L.B).

#### 4.1.4. Perilaku Kekerasan

Perilaku kekerasan di Nusakambangan juga karena pengaruh negatif pegawai senior terhadap pegawai baru untuk melakukan kekerasan. Petugas pemasarakatan senior akan mempengaruhi petugas baru (baik pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi atau pendidikan sederajat) dengan meminta mereka untuk melakukan perilaku kekerasan terhadap narapidana. Mereka yang tidak mengikuti ajakan senior akan mendapatkan perlakuan yang merugikan. Misalnya dihina dan direndahkan. Tergambar dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

*"Kalo menurut saya sih ya turun temurun sama aja sih tradisi.... ya bermacam-macam ada yang bilang banci suruh pakai rok terus gak gentle bukan laki-laki udah pindah aja"* (Wawancara dengan K.L.L.N).

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Sikap Petugas perihal Kekerasan terhadap Narapidana

Sikap petugas terhadap narapidana mempengaruhi bagaimana dia berperilaku atau menanggapi perilaku narapidana (Maynard-Moody & Musheno, 2000; Liebling, 2008; Maynard-Moody & Portillo, 2000). Apakah itu hukuman atau rehabilitatif. Sikap menghukum adalah kecenderungan seseorang untuk memaksakan keadilan retributif pada pelaku atau narapidana daripada rekonsiliasi atau penyelesaian kompensasi (Hosser et al., 2007). Sikap yang menghukum membuat petugas menjadi sinis, otoriter, dan pesimis terhadap narapidana. Sedangkan sikap rehabilitatif justru sebaliknya, dimana seseorang cenderung memandang narapidana sebagai manusia yang masih bisa direhabilitasi.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa beberapa sikap masuk ke dalam kategori punitif. Informan melihat perlu diberikan "shock therapy" karena banyak narapidana yang dipindahkan/mutasi ke Nusakambangan adalah narapidana bermasalah di lapas sebelumnya. Kekhawatiran akan terulangnya perilaku melanggar hukum di penjara membuat petugas berperilaku dengan cara yang dirasakan narapidana. Sumber lain mengatakan, dia merasa tidak nyaman dan khawatir serta tidak ingin napi mengulangi perbuatannya, apalagi dengan jumlah petugas yang sedikit. Di sisi lain, mereka menghadapi narapidana yang dihukum lama dan berisiko tinggi, seperti kasus terorisme, pengedar narkoba, pembunuhan sadis, dan kasus berat lainnya.

Mereka yang lebih takut akan tindakan kriminal akan melihat hukuman sebagai cara tercepat untuk mengendalikan perilaku kriminal (Costelloe et al., 2009).

Para informan menilai para koruptor dan narapidana tidak lagi takut dengan Nusakambangan. Mereka beranggapan bahwa ada informasi bahwa peningkatan warga binaan di kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan semakin meningkat. Fenomena ini menyebabkan petugas merasakan semangat korps, sehingga muncul sikap kekerasan saat menerima narapidana pindahan bermasalah dari lapas sebelumnya. Meningkatnya tren

perilaku buruk narapidana juga menyebabkan pola pikir petugas menghukum narapidana (Hogan *et al.*, 2005; Pfeiffer *et al.*, 2005; Roberts & Indermaur, 2007; Spiranovic *et al.*, 2012). Sikap menghukum juga dipengaruhi oleh keinginan informan untuk mengembalikan budaya Nusakambangan agar ditakuti oleh pelaku dan narapidana.

Selain kedua faktor tersebut, kemarahan meningkat ketika kasus narapidana bertentangan dengan nilai subjektif petugas. Menurut Hartnagel & Templeton (2012), kemarahan ini merupakan salah satu prediktor dari sikap menghukum seseorang. Selanjutnya, kemarahan atas tindak pidana/nilai subjektif juga memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap sikap punitif daripada faktor ketakutan terhadap suatu tindakan kejahatan.

#### 4.2.2. Perilaku Petugas yang erat dengan Kekerasan

Informan mengatakan perilaku kekerasan sudah menjadi tradisi di Nusakambangan. Aturan kekerasan adalah warisan dari generasi ke generasi. Menurut awalnya, kebiasaan kekuasaan ditularkan dari petugas senior kepada petugas junior melalui tekanan untuk melakukan perilaku kekerasan terhadap narapidana. Secara psikologis disebut sebagai peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau teman terdekat yang secara langsung mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan. Tekanan ini dapat berupa ejekan, intimidasi, dan kata-kata yang merendahkan untuk mendorong individu menyesuaikan perilakunya untuk memperoleh pengakuan, status, dan prestise dari anggota kelompoknya (Sijtsema *et al.*, 2009). Selain itu, tekanan otoritas senior berdampak pada kepatuhan petugas baru dengan perilaku kekerasan (Milgram, 1963).

#### 4.2.3. Persepsi Kontrol Perilaku

Sumber itu menyebutkan, SOP penerimaan narapidana dari pelabuhan Wijayapura ke lapas tujuan tidak ada. Dikatakannya, belum ada SOP yang jelas terkait proses ini. Sampai saat ini, belum ada SOP penerimaan dari pelabuhan Wijayapura ke Lapas tujuan. Selama ini, sumber tersebut mengaku belum mengetahui SOP penerimaan narapidana yang disosialisasikan dengannya. Tanpa aturan dan pengawasan yang jelas, emosi negatif dalam situasi penerimaan narapidana sulit dikendalikan. Selain itu, keterampilan petugas dalam mengelola emosi marah saat menghadapi narapidana perlu dilatih untuk bertindak lebih rasional.

#### 4.2.4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan temuan di atas, faktor pendukung dan faktor penghambat sumber terjadinya tindak kekerasan merupakan faktor yang menjadi faktor pendukung. Sikap Punitif tersebut antara lain memberikan "*shock therapy*" kepada narapidana bermasalah di lembaga pemsarakatan sebelumnya, ingin mengembalikan muruah Nusakambangan yang ditakuti para penjahat dan narapidana, dan pandangan geram atas riwayat kasus narapidana yang bertentangan dengan nilai barang yang dianggapnya berharga. Selain itu, dari segi faktor sosial, adanya tekanan sosial dari rekan kerja dan atasan membuat petugas baru yang terinfeksi melakukan kekerasan terhadap narapidana. Sehingga perilaku ini menjadi berkelanjutan di Nusakambangan.



Tabel 1. Faktor Pendukung dan Penghambat Perilaku Kekerasan

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
a. Sikap Punitif Petugas terhadap Narapidana ( <i>Shock Therapy</i> )	a. Mutasi/rotasi pejabat internal dalam satu wilayah dan antar wilayah
b. Tekanan sosial dari rekan kerja dan senior	b. Pelatihan hak asasi manusia/SMR dan pelatihan terkait lainnya
c. Tidak ada SOP penerimaan dari Wijayapura ke Lapas tujuan	c. Membuat SOP penerimaan dari Wijayapura ke Lapas tujuan
d. Ingin mengembalikan muruah Nusakambangan	d. Menemukan dan melatih petugas cara-cara alternatif untuk menangani narapidana selain kekerasan
e. Petugas belum mengetahui cara alternatif menghadapi narapidana selain tindak kekerasan	
f. Semangat korps muncul ketika menerima pemindahan bermasalah narapidana dari penjara sebelumnya	e. Semangat korps untuk saling mengingatkan agar tidak melakukan kekerasan

Namun, ada beberapa faktor yang menghambat perilaku kekerasan di Nusakambangan. Berdasarkan wawancara dengan informan, beberapa faktor penghambat perilaku kekerasan di Nusakambangan. Yang pertama adalah mutasi petugas keamanan untuk belajar memandang narapidana lebih rehabilitatif dari sebelumnya. Mutasi ini dilakukan karena penegakan dan pengawalan penerimaan SOP agar petugas yang baru dimutasi ke departemen keamanan tidak terjerumus perilaku kekerasan. Selain itu, faktor pendidikan juga mempengaruhi berkurangnya sikap terhadap hukuman.

#### 4.2.5. Faktor Pendukung dan Penghambat

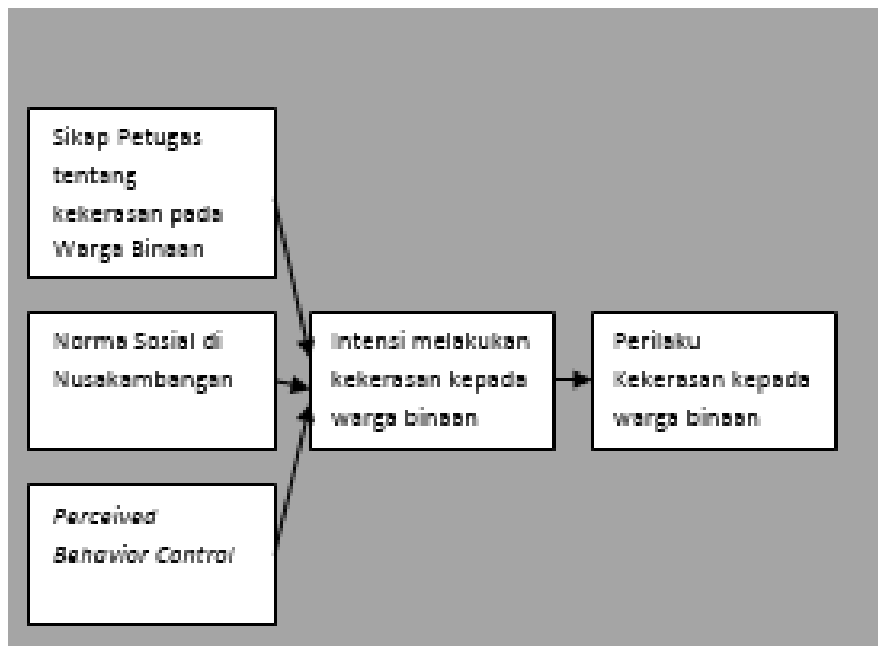
Teori Niat Ajzen menghubungkan sikap, norma, kehendak (niat), hambatan, dan dukungan terhadap suatu perilaku (Jogiyanto, 2007). Ajzen (1991) mengatakan bahwa sikap dapat mempengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan yang menyeluruh dan beralasan, yang terbatas pada hal-hal di bawah ini:

- Sikap tertentu terhadap sesuatu menentukan tindakan.
- Norma atau keyakinan subjektif mempengaruhi perilaku tentang apa yang orang lain ingin kita lakukan.
- Sikap terhadap perilaku dan norma serta hambatan dan dukungan tentunya membentuk niat untuk berperilaku.

Jogiyanto (2007) berpendapat bahwa niat adalah fungsi dari dua faktor penentu: sikap individu terhadap perilaku (aspek pribadi) dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan tindakan. Kontrol perilaku yang dirasakan adalah faktor lain di luar persepsi diri dan kecemasan sosial untuk mengontrol perilaku individu (Hsu & Chiu, 2002). Jogiyanto (2007) berpendapat bahwa perilaku tidak hanya bergantung pada motivasi tetapi juga aturan pada tindakan.

Maka jika mengacu pada teori ini, sikap petugas tentang kekerasan dan norma-norma sosial yang ada di kalangan petugas menjadi motivasi petugas untuk melakukan perilaku kekerasan dan mempengaruhi niat atau seberapa besar keinginan untuk melakukan kekerasan.

SOP yang tidak terpusat dan keahlian untuk “menjinakkan” narapidana di luar kekuasaan untuk berkontribusi pada perilaku ini.



Gambar 2. Pola Perilaku Kekerasan Petugas mengacu pada Teori Perilaku Terencana Ajzen (1985)

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan mengidentifikasi faktor-faktor pemicu kekerasan yang dilakukan petugas terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan. Maksud kekuasaan menentukan tiga faktor penentu: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang nantinya akan memunculkan perilaku kekerasan. Berdasarkan proses analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan antara lain: sikap petugas terhadap kekerasan pada narapidana, budaya yang berkembang di kalangan petugas pemasarakatan di Nusakambangan dan kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceived Behavioral Control*). Penelitian ini menemukan beberapa faktor pendukung terjadinya kekerasan dari penyidikan, antara lain sikap Punitif petugas terhadap narapidana (*Shock Therapy*) dan tekanan sosial dari rekan kerja dan senior. Penjahat dan narapidana takut dengan budaya Nusakambangan, dan petugas belum mengetahui cara alternatif untuk menangani narapidana selain tindakan kekerasan. Belum ada SOP penerimaan dari Wijayapura ke Lapas tujuan. Semangat korps muncul saat menerima narapidana pindahan bermasalah dari penjara sebelumnya.

Hasil penelitian diperoleh beberapa faktor penghambat perilaku kekerasan, antara lain mutasi/rotasi petugas secara internal di satu wilayah dan antar wilayah, pelatihan HAM, SMR dan pelatihan terkait lainnya, membuat penerimaan SOP dari Wijayapura ke Lapas tujuan, mencari dan melatih petugas dengan cara alternatif. dalam menghadapi narapidana selain kekerasan dan semangat korps untuk saling mengingatkan agar tidak melakukan kekerasan.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

## 7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1985). *From Intention to Action: A Theory of Planned Behavior*. New York: Springer.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-t](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t)
- Bernard, T. J. (1990). Angry Aggression Among The “Truly Disadvantaged”. *Criminology*, 28(1), 73–96. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1990.tb01318.x>
- Costelloe, M. T., Chiricos, T., & Gertz, M. (2009). Punitive attitudes toward criminals. *Punishment & Society*, 11(1), 25–49. <https://doi.org/10.1177/1462474508098131>
- Dermawan, R., & Rusdi. (2013). *Keperawatan Jiwa: Konsep dan Kerangka Kerja*. Asuhan Keperawatan Jiwa. Yogyakarta: Gosyen Publisihing.
- Detikcom. (2016, April 23). *Cerita Versi Napi Lapas Banceuy Soal Kematian Temannya yang Picu Kerusakan*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3195065/cerita-versi-napi-lapas-banceuy-soal-kematian-temannya-yang-picu-kerusakan>
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2018). *Rancangan Naskah Akademik Revitaliasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648>
- Covesia.com. (2019, March 15). *Kekerasan di Lapas, LBH Padang Desak Kanwil Kemenkumham Berbenah*. <https://covesia.com/archipelago/71298/kekerasan-di-lapas-lbh-padang-desak-kanwil-kemenkumham-berbenah>
- Fitria, N. (2010). *Prinsip Dasar dan Aplikasi Penulisan Laporan Pendahuluan dan Strategi Pelaksanaan Tindakan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hogan, M. J., Chiricos, T., & Gertz, M. (2005). Economic Insecurity, Blame, and Punitive Attitudes. *Justice Quarterly*, 22(3), 392–412. <https://doi.org/10.1080/07418820500219144>
- Hosser, D., Raddatz, S., & Windzio, M. (2007). Child Maltreatment, Revictimization, and Violent Behavior. *Violence and Victims*, 22(3), 318–333. <https://doi.org/10.1891/088667007780842829>
- Hsu, M. H., & Chiu, C. M. (2004). Predicting electronic service continuance with a decomposed theory of planned behaviour. *Behaviour & Information Technology*, 23(5), 359–373. <https://doi.org/10.1080/01449290410001669969>
- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Landry, C. C. (2003). *Self-efficacy, motivation, and outcome expectation correlates of college students' intention certainty* (Doctoral Dissertations). Louisiana State University Libraries. [https://doi.org/10.31390/gradschool\\_dissertations.1254](https://doi.org/10.31390/gradschool_dissertations.1254)
- Liebling, A. (2008). Incentives and Earned Privileges Revisited: Fairness, Discretion, and the Quality of Prison Life. *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 9(sup1), 25–41. <https://doi.org/10.1080/14043850802450773>

- Maynard-Moody, S., & Musheno, M. (2000). State Agent or Citizen Agent: Two Narratives of Discretion. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(2), 329–358. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024272>
- Maynard-Moody, S & Portillo, S. (2000). *The Oxford Handbook of American Bureaucracy*. Oxford.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Nawawi. (2003). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Pfeiffer, C., Windzio, M., & Kleimann, M. (2005). Media Use and its Impacts on Crime Perception, Sentencing Attitudes and Crime Policy. *European Journal of Criminology*, 2(3), 259–285. <https://doi.org/10.1177/1477370805054099>
- Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Republik Indonesia (1995). *Undang-Undang Tentang Pemasarakatan No. 12 tahun 1995*. Jakarta.
- Roberts, L. D., & Indermaur, D. (2007). Predicting Punitive Attitudes in Australia. *Psychiatry, Psychology and Law*, 14(1), 56–65. <https://doi.org/10.1375/pplt.14.1.56>
- Sijtsema, J. J., Veenstra, R., Lindenberg, S., & Salmivalli, C. (2009). Empirical test of bullies' status goals: assessing direct goals, aggression, and prestige. *Aggressive Behavior*, 35(1), 57–67. <https://doi.org/10.1002/ab.20282>
- Spiranovic, C. A., Roberts, L. D., & Indermaur, D. (2012). What Predicts Punitiveness? An Examination of Predictors of Punitive Attitudes towards Offenders in Australia. *Psychiatry, Psychology and Law*, 19(2), 249–261. <https://doi.org/10.1080/13218719.2011.561766>
- Tirto.id. (2019, June 25). *KPAI: 26,8 Persen Napi Lapas Anak Alami Kekerasan*. <https://tirto.id/kpai-268-persen-napi-lapas-anak-alami-kekerasan-ec3P>

---

## Tentang Penulis

1. **Syahrial Yuska** memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia, dan memiliki keahlian di bidang Hukum Pemasarakatan.  
E-Mail: [syahyuska@gmail.com](mailto:syahyuska@gmail.com)
2. **Muhammad Ali Equatora** memperoleh gelar Magister Administrasi Publik dari STISIPOL Candradimuka, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Bimbingan Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia, memiliki sertifikasi sebagai pekerja sosial, dan memiliki keahlian dalam praktik pekerjaan sosial korektif, serta memiliki pengalaman sebagai pekerja sosial profesional dan *reviewer* aktif di jurnal nasional dan internasional bereputasi.  
E-Mail: [bangtora1973@gmail.com](mailto:bangtora1973@gmail.com)
3. **Mitro Subroto** memperoleh gelar Magister Psikologi Kriminal dari Universitas Indonesia pada tahun 2005. Penulis adalah dosen pada Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia, dan memiliki keahlian dalam Pembinaan Pemasarakatan.  
E-Mail: [subrotomitro007@gmail.com](mailto:subrotomitro007@gmail.com)
4. **Imaduddin Hamzah** memperoleh gelar Doktor Ilmu Psikologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2011. Penulis adalah dosen pada Program Studi Bimbingan Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia, dan memiliki keahlian dalam Psikologi Klinis dan Bimbingan Konseling.  
E-Mail: [imaduddin@poltekip.ac.id](mailto:imaduddin@poltekip.ac.id)